

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

**KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) menyatakan setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkeadilan serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Bupati Tanah Laut yang memuat tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah , serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 - 2023 telah habis pada tahun 2023. Disisi lain dengan dikeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penngyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026.

Dalam penyusunan Rencana strategis Pembangunan Daerah (Renstra PD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 memperhatikan : (1.) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan

RPJMD Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2026: (2). Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 ; (3) Isu-isu strategis yang berkembang ; (4) Kebijakan Nasional dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 -2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan. Dokumen ini lebih visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan dibidang pertanian yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan perencanaan dokumen lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam dan lintas pasal 1 ayat 1 & 2 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi, pengorganisasian dan pengukuran hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 3 (tiga) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan. Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024–2026 , peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
9. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/400/II.03.03/TW.III tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
14. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Permendagri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023;
18. Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan adalah :memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan

tujuan pembangunan daerah di Bidang Pertanian di Kabupaten Tanah Laut secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang pertanian, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tahunan selama tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Tersusunnya rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun ke depan 2024 – 2026.
2. Menentukan arah pembangunan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian periode 2024-2026
3. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
4. Mewujudkan penjabaran Visi dan Misi yang diemban pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026
5. Tersedianya program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang lebih terarah dan partisipatif sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat petani dan pelaku pertanian lainnya.
6. Terselenggaranya pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
7. Menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunnya. Dan sebagai pedoman bagi setiap bidang dalam menyusun dan mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap maupun berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V.	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI.	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, diantaranya meliputi sebuah gedung kantor dengan luas tanah 38.364 m² yang terletak di Jl. Datu Insad Nomor Telepon 0512-21008 serta sarana dan prasarana perkantoran lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten TanahLaut mempunyai fungsi :

1. Tugas Pokok

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPTD Dinas, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur dan Bagan Organisasi

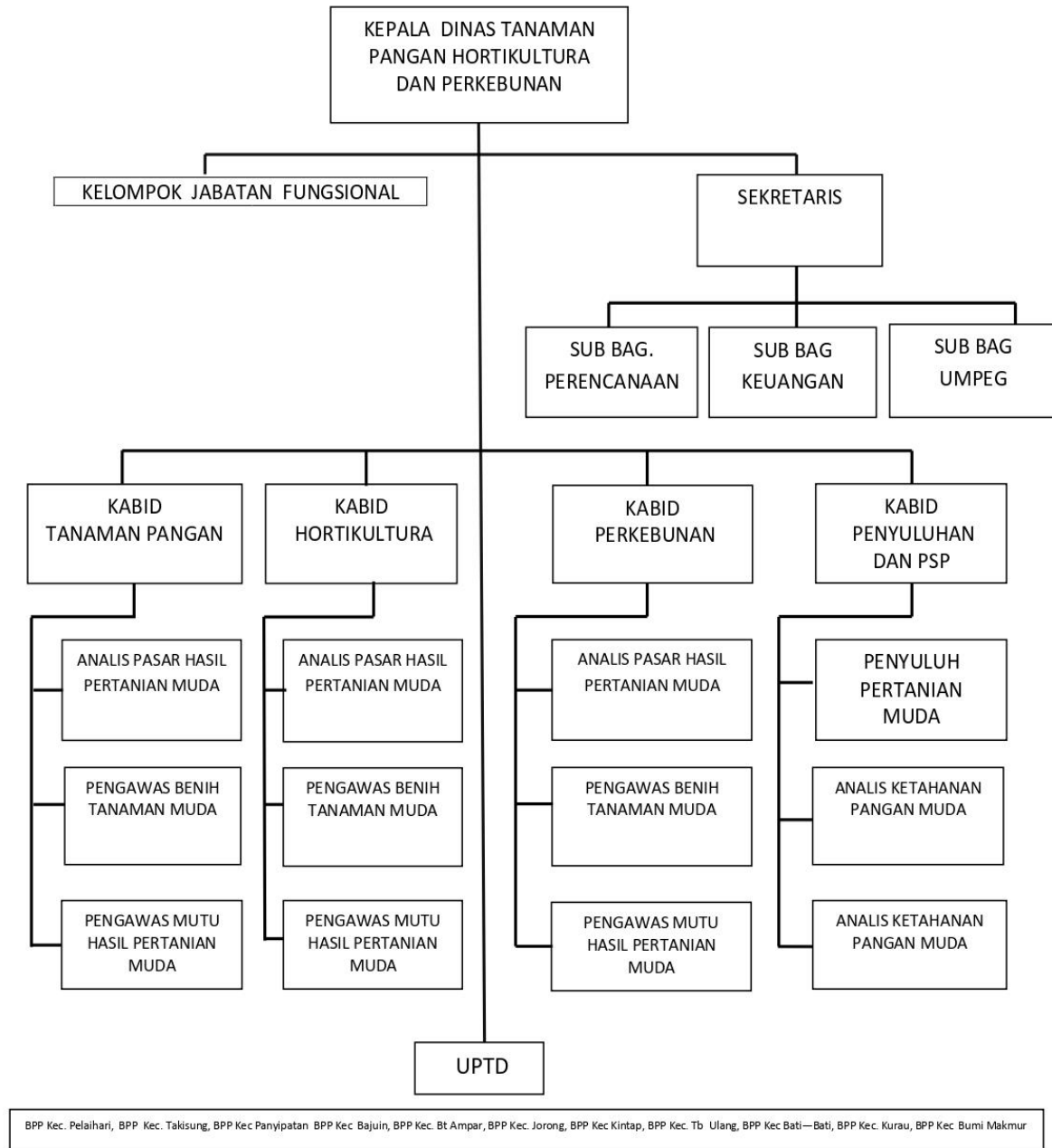
A. Struktur Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Muda
 - 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
 - 3) Analis Pasar Hasil Pertanian Muda.
- d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Muda
 - 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
 - 3) Analis Pasar Hasil Pertanian Muda.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Muda
 - 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
 - 3) Analis Pasar Hasil Pertanian Muda.
- f. Bidang Penyuluh dan PSP, terdiri dari :
 - 1) Penyuluh Pertanian Muda
 - 2) Analis Ketahanan Pangan Muda; dan
 - 3) Analis Ketahanan Pangan Muda
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



2.2. Keadaan Pegawai

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut mempunyai aparatur/ pegawai/ tenaga fungsional pegawai tidak tetap dengan latar belakang pendidikan dan tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dengan nama kantor masing-masing Kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian BPP, untuk mengetahui jumlah pegawai tahun 2022 tersebut akan disajikan daftar table sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris Dinas	1 orang
3	Kepala B dang	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	3 orang
5	Kepala BPP	11 orang
6	Jabatan Fungsional Muda	12 orang
7	Jabatan Fungsional Madya	6 orang
8	Staf	5 Orang
9	P3K	16 orang
10	Non PNS	49 orang

Tabel 2.2.2
Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah		
	ASN	P3K	PTT
S2	1	-	-
S1	94	14	15
DIII	8	1	8
SLTA	14	1	22
SMP	-	-	3
SD	1		1
Jumlah	118	16	49

Tabel 2.2.3
Berdasarkan Golongan

Golongan	ASN
I	1
II	5
III	81
IV	31
Jumlah	118

Tabel 2.2.4
Berdasarkan Eselon

Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1	5	3

2.3. Produk dan layanan

Jenis Produk dan Layanan yang diselenggarakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut meliputi :

Tabel 2.3.1
Produk dan Layanan

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok Sasaran	Sumber Dana
1	Bidang Tanaman Pangan • Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan • Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian • Pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi	• Pemberian hibah saprodi berupa obat-obatan, benih dan bibit • Pinjam pakai alat mesin pertanian (alsintan) • Pelatihan, Pertemuan dan sosialisasi workshop, penyuluhan, sarasehan/diskusi • Pengadaan Alsintan	• Kelompok Tani	APBD, DAK, APBN

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok Sasaran	Sumber Dana
2	Bidang Hortikultura • Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura • Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	• Pemberian hibah saprodi berupa obat-obatan, benih, dan bibit • Pinjam pakai alat mesin pertanian (alsintan)	• Kelompok Tani	APBD, DAK, APBN
3	Bidang Perkebunan • Pengendalian organisem pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan • Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	• Pemberian hibah saprodi berupa obat-obatan benih dan bibit • Pelatihan pertemuan sosialisasi workshop	• Kelompok Tani	APBD, DAK, APBN
4	Bidang Penyuluh & PSP • Pembangunan/ rehabilitasidan pemeliharaan jalan usaha tani (JUT) • Penyusunan standar pelayanan public pemberian rekomendasi usaha pertanian • Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian • Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian	• Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi • Rekomendasi pinjam pakai alsintan • Pemberian pupuk bersubsidi • Pemanfaatan pupuk organik	• Kelompok Tani	APBD, DAK, APBN

2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selain dukungan sumber daya manusia juga sangat perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan

sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut . ketersediaan sarana dan prasarana sangat membantu untuk membuat dan menyajikan laporan kegiatan dalam bentuk on line ataupun penyampaian data base lainnya dengan tepat waktu dan sasaran. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2.4.1
Keadaan Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Traktor Lainnya	5
2	Exavator	1
3	Portable Generating Set	1
4	Pompa Air	70
5	Selang Air	4
6	Station Wagon	2
7	Mini Bus	1
8	Pick Up	3
9	Sepeda Motor	100
10	Mesin Bubut	1
11	Mesin Gerinda	2
12	Mesin Kompresor	2
13	Mesin Pemotong Plat	1
14	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1
15	Peralatan Las Listrik	3
16	Peralatan Las Karbit	1
17	Perkakas Bengkel Service Lainnya	2
18	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	3
19	Gunting Kain	1
20	PH Meter	4
21	GPS	25
22	Moisteur Meter	4
23	Alat Ukur Universal Lainnya	1
24	Alat Ukur Kadar Air	2
25	Alat Ukur Lain-Lainnya	10
26	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	2
27	Tractor Four Wheel	31
28	Traktor Tangan Dengan Perelengkapannya	169
29	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya	3

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
30	Semprotan Mesin	14
31	Semprotan Tangan	102
32	Alat Pemeliharaan Tanaman/ikan/ ternak Lainnya	5
33	Alat Perontok Mesin	40
34	Alat Pengering	9
35	Alat Pengukur Kadar Air	9
36	Alat Panen Lainnya	95
37	Lemari Penyimpan	1
38	Alat Pengukur Curah Hujan	1
39	Alat Pengukur P.H Tanah	2
40	Alat Laboratorium Lainnya	43
41	Unit Pengaduk	4
42	Alat Pembuat Pelet	2
43	Alat Prosesing Lainnya	12
44	Alat Pasca Panen Lainnya	21
45	Alat Pengolahan Lainnya	1
46	Mesin Ketik Manual Portabel	16
47	Mesin Ketik Listrik	11
48	Lemari Besi/Metal	49
49	Lemari Kayu	14
50	Rak Besi	15
51	Rak Kayu	2
52	Filing Cabinet Besi	17
53	Brankas	2
54	Lemari Sorok	1
55	Lemari Kaca	14
56	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	5
57	CCTV	1
58	Peta	1
59	Alat Pemotong Kertas	1
60	Mesin Laminating	1
61	LCD Projector	23
62	Focusing Screen/Layar LCD	5
63	Papan Nama Instansi	11
64	Papan Pengumuman	1
65	Alat Kantor Lainnya	1
66	Meja Kerja Besi	1
67	Meja Kerja Kayu	177
68	Meja Rapat	92
69	Kursi Rapat	254
70	Kursi Tamu	18
71	Kursi Putar	40

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
72	Kursi Biasa	146
73	Kursi Lipat	72
74	Meja Komputer	15
75	sofa	1
76	Meuble Lainnya	1
77	Mesin Potong Rumput	11
78	Alat Pembersih Lainnya	7
79	Lemari Es	6
80	A.C Split	53
81	Kipas Angin	5
82	Alat Pendingin Lainnya	1
83	Kompor Gas	2
84	Rice Warmer	32
85	Blender	1
86	Alat dapur Lainnya	3
87	Televisi	9
88	Loudspeaker	17
89	Sound System	34
90	Unit Power Supply	3
91	Stabilisator	3
92	Dispenser	7
93	Mimbar Podium	1
94	Handy Cam	1
95	Gordyin	2
96	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	12
97	Alat Pemadam/Portble	1
98	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	28
99	Kursi Pejabat Lainnya	4
100	Audio Mixing Stationer	2
101	Microphone/Wireless MIC	21
102	Microphone/Boom Stand	2
103	peralatan studio audio lainnya	37
104	Camera Electronic	40
105	Tripod Kamera	1
106	Camera Film	1
107	Lensa Kamera	1
108	Servo Zoom Lens	1
109	Layar Film/Projector	36
110	Splitter	11
111	Alat Studio Video Lainnya	2
112	Mesin Jilid	1
113	Handy Talky (HT)	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
114	Facsimile	1
115	Slide Projector (Lapangan)	1
116	Genset	13
117	alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan lainnya	2
118	Blender	1
119	Timbangan/Neraca	1
120	Thermometer	1
121	Lampu Spritus	2
122	Shaker	1
123	Autoclave	1
124	Fumehood	1
125	Generator	4
126	Hammer Mill	2
127	Hot Plate	1
128	Hot Plate Stirer	1
129	Liminar Flow Cabinet	1
130	PH Meter Digital	1
131	Sharp Knife	2
132	Timer Lab.	1
133	Peralatan Ubinan	12
134	alat laboratorium pertanian lainnya	9
135	alat laboratorium kearsipan lainnya	6
136	Gelas Ukur	6
137	Pipet Tetes	5
138	Sppatula Tanduk	2
139	Spatula Stenless Steel	2
140	Uninterrupted Power Supply	30
141	Corong Kaca	1
142	P.C Unit	76
143	Lap top	51
144	Note book	44
145	Monitor	3
146	Printer	98
147	Scanner	16
148	External/ Portable Hardisk	20
149	Peralatan Personal Komputer Lainnya	8
150	Modem	5
151	Peralatan Jaringan lainnya	1

2.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB di Kabupaten Tanah Laut, sebesar 27.19% pada tahun 2022 pada perhitungan Angka Sangat Sementara BPS, namun kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan distribusi persentase PDRB -0,76%. Hal ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan sawah, serta terjadinya penjualan hasil komoditi pertanian ke daerah luar Kabupaten Tanah Laut dengan harga yang rendah. Penurunan jumlah anggaran rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian. Pada hal sektor pertanian memberikan kontribusi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Laut. Adanya alih fungsi lahan dari komoditas tanaman pangan ke komoditas hortikultura dan perkebunan juga sangat berdampak kepada produksi komoditas pertanian yang dihasilkan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya (Renstra periode 2018 -2023), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Capaian Realisasi Produksi Tahun 2018–2022
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

No.	Komoditas	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	Ton	293.608	271.941	289.645	145.890	143.962
2	Jagung	Ton	212.903	238.792	225.084	124.267	122.835
3	Kedelai	Ton		61	5,7	32	1.670
4	Bawang Merah	Ton	77,7	71,4	17,3	36,6	11,00
5	Cabe	Ton	1.468,8	1.893	2.128	2.135,5	2.350,90
6	Karet	Ton	7.619	8.117	6.920,3	14.324,3	14.601,70
7	Sawit	Ton	19.140	21.975	21.192	49.473,7	50.865,7

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Berdasarkan data diatas, hasil produksi komoditas sektor tanaman pangan berupa padi dan jagung dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan, namun diikuti kenaikan produksi komoditas kedelai pada akhir tahun 2022 dengan kenaikan produksi sangat signifikan dibanding thn 2021 sebesar 1.638 ton karena dipanen kedelai belum terjadi proses pengeringan.

Penurunan produksi padi disebabkan adanya banjir dan serangan hama penyakit tanaman pengganggu tanaman (Tungro) sedangkan untuk jagung karena adanya alih fungsi lahan dan serangan hama penyakit tanaman.

Sedangkan komoditas tanaman hortikultura berupa bawang merah kecenderungan mengalami fluktuatif kenaikan produksi namun pada akhir tahun 2022 kecenderungan penurunan sangat drastis sebesar 28,6 ton, namun untuk cabe empat tahun terakhir dari tahun 2019 s/d 2022 selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penurunan produksi bawang merah dikarenakan anggaran . pengembangan komoditas bawang merah menurun, petani masih sangat bergantung pada bantuan benih dan saprodi dari pemerintah, mengingat biayanya yang cukup mahal dan kurang terjangkau oleh sebagian besar petani dan belum adanya kemandirian petani secara swadaya karena perlu modal besar dan perawatan tanam yang cukup rumit dibanding dengan komoditas lainnya. Sedangkan kenaikan produksi cabe dari tahun ketahun meningkat dikarenakan minat para petani cabe sangat tinggi dan adanya kemandirian petani secara swadaya.

Komoditas perkebunan berupa karet dan sawit dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, kenaikan yang sangat tinggi terjadi mulai tahun 2020 s/d 2021 . Untuk karet kenaikan produksi sebesar 7.404 ton sedang sawit kenaikan produksi sebesar 28.281,7 ton. Kenaikan produksi karet dan sawit dikarenakan adanya kenaikan harga pasar global dunia yang sangat berimbas kepada petani karet dan sawit.

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan lima tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian.

Peningkatan pendapatan petani melalui penguatan dan peningkatan produk dari komoditi pertanian dihadapkan pada beberapa permasalahan serta tantangan yang sangat perlu jadi perhatian stakeholder atau pemangku kebijakan terkait kontribusi pertanian dalam meeningkatkan PDRB kedepannya.

1. Tantangan

a. Lahan

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif. Menyusutnya area lahan pertanian Kabupaten Tanah Laut akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian secara efektif tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun konversi lahan pertanian masih terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut juga telah berupaya untuk mengusulkan Pembuatan LP2B dalam melindungi lahan pertanian yang akan mengarah nantinya mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai amanat UU Nomor 41 tahun 2009. Penurunan tingat produksi pertanian terkait kurngnya lahan sawah juga disebabkan kemampuan cetak sawah oleh Pemerintah belum sesuai dengan laju konversi lahan sawah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan persoalan masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

Pola tanam serta pengetahuan petani juga mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian mengalami penurunan kualitas bahkan beberapa masuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan pemakaian bahan kimia anorganik yang berlebihan yang berakibat pada struktur tanah menjadi padat dan daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman menurun. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka kerusakan lahan akan semakin meluas dan berakibat pada penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

b. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani, terutama kurang memadainya jaringan irigasi tersier yang sudah banyak rusak.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, dan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

c. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan

peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan social.

- Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani yang berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa. Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap menurunnya minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami

perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

d. Pasar Bebas

Dengan berlakunya Pasar Bebas , semua produk dari dalam dan luar negeri akan bebas keluar masuk Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut merupakan ancaman bagi usaha pertanian yang masih mempunyai produktivitas dan mutu yang rendah, serta masuknya produk dari luar daerah yang berdampak turunnya daya jual produk pertanian daerah, persoalan ini juga ditambah dengan adanya penjualan gabah ke luar daerah dengan harga yang rendah oleh para pembeli.

e. Tingginya Angka Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya pertumbuhan penduduk baik dengan kelahiran maupun perpindahan penduduk dari daerah lain akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan yang akan membuat berkurang stock akan bahan pangan tersebut terutama bahan pangan asal padi.

2. Peluang

a. Pasar

Permintaan pasar terhadap produk pertanian seperti beras, jagung, kedelai, buah, sayuran dan tanaman perkebunan seperti sawit, karet dan kopi masih cukup besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama pasar local

b. Dana Penguatan dari Pemerintah dan Perbankan

Adanya dana penguatan modal dari pemerintah pusat, provinsi serta Kabupaten Tanah Laut, berupa Dana Tugas Pembantuan dan APBD yang dialokasikan untuk penguatan modal usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan peluang besar

bagi petani untuk mengembangkan usahanya. Sehingga masalah permodalan yang menjadi kendala utama selama ini diminimalisir. Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usahatani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplentasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian. Selain itu Pemerintah Pusat melalui dana dekonsentrasi juga menyiapkan dana penguatan modal untuk pengembangan usaha pertanian antara lain berupa bantuan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), kredit PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), KKP (Kredit Ketahanan Pangan), PKP (Peningkatan Ketahanan Pangan Agribisnis), dan lainnya.

c. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

Masih terdapat daerah-daerah yang produktivitas dan mutu hasil pertaniannya masih rendah, namun dapat ditingkatkan produksinya melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air untuk meningkatkan indeks pertanaman dari 1 kali menjadi 2 kali.

d. Benih Bersertifikat

Penjaminan Penyediaan benih bersertifikat produksi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

e. Pengolahan Hasil Pertanian

Pengembangan iklim usaha pertanian, khususnya penyediaan sarana pasca panen masih dapat terus dikembangkan, mengingat masih kurangnya sarana pasca panen dan usaha pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Tanah Laut

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan analisis kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Tugas dan Fungsinya tersaji dalam tabel 3. 1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut.

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	Belum optimalnya hasil produksi pertanian	1. Masih terbatasnya Sarana Prasarana Pertanian 2. Terbatasnya Anggaran 3. Dampak perubahan iklim dan Bencana Banjir 4. Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 5. Masih lemahnya kelembagaan petani dan rendahnya tingkat kemandirian petani 6. Terbatasnya kualitas dan kuantitas ASN/SDM yang kompeten di bidang pertanian,khususnya tenaga penyuluh ahli

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
			7. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja, antar bidang, dan antar BPP dll dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya 8. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air 9. Masih terbatasnya ketersediaan pupuk 10. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani

Rumusan akar masalah berdasarkan analisa permasalahan dan permasalahan utama yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis sebagaimana diuraikan seperti di bawah ini :

1. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Pertanian

Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang terbatas dapat memengaruhi produksi pertanian, seperti mahalnya harga alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang sulit untuk dijangkau para petani. Sampai saat ini jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk mendukung produktivitas pertanian khususnya tanaman padi, berupa hand tractor sebanyak 170 unit dengan kebutuhanyang idealnya 200 unit, sekarang masih ada kekurangan sebesar 30 unit hand tractor.

Data Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Nama Barang	Jumlah Unit
1	Combine	64
2	Corn Sheller	51
3	Power Thresher	30
4	Cultivator	26

No	Nama Barang	Jumlah Unit
5	Tractor Roda 4	31
6	Tractor Roda 2	170
7	Pompa Air	302
8	Rice Transplantere	80
9	Hand Sprayar	328
10	Tray	1.200
11	Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	632
12	Embung	13
13	Irigasi	57
14	Waduk	32

Selain dari pada itu Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur belum terpenuhi secara maksimal seperti keterbatasan mobil operasional dan ruang pertemuan pada UPT. BPP di Kecamatan.

2. Terbatasnya Anggaran -

Selama Ini produksi Pertanian masih tergantung dengan dukungan dana baik dari Pusat maupun Daerah, yang digunakan untuk mendukung program atau kegiatan seperti bantuan benih, pupuk, obat pembasmi hama dan lainnya, dari Pra panen sampai Pasca Panen.

Anggaran Tahun 2021-2023 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
2021	27.825.117.281
2022	42.763.638.991
2023	36.012.918.794

3. Dampak perubahan iklim dan Bencana Banjir

Cuaca/Iklim sangat mempengaruhi aktivitas para petani, seperti cuaca yang tidak menentu, masa tanam petani yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober /November tidak dapat dilaksanakan karena ternyata bulan tersebut terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir.

Data DPI (Dampak Perubahan Iklim)
Tahun 2020-2022

Luas Lahan (Ha)		
2020	2021	2022
1.755,5	2.390,9	500,44

4. Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)

Salah satu penyebab utama belum optimalnya hasil produksi pertanian adalah adanya serangan OPT yang menyebabkan tanaman pertanian menjadi rusak atau gagal panen.

Data serangan OPT Tahun 2020-2022

Luas Lahan (Ha)		
2020	2021	2022
443,44	370,69	981,40

5. Masih lemahnya kelembagaan petani dan rendahnya tingkat kemandirian petani

Kelembagaan pertanian adalah kelembagaan yang tumbuh kembang dari oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani diantaranya yaitu Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani), Kelompok Taruna Tani/Kelompok Tani Milineal, KWT (Kelompok Wanita Tani), KTNA (Kelompok Tani dan Nelaya Andalan). Kelembagaan tersebut belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, kesadaran kelembagaan tersebut masih rendah sehingga sangat perlu dilakukan pembinaan.

6. Terbatasnya kualitas dan kuantitas ASN/SDM yang kompeten di bidang pertanian, khususnya tenaga penyuluh ahli

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kedinasan adalah factor pendukung kelancaran kegiatan bidang teknis. Jumlah Penyuluh yang masih terbatas yaitu jumlah penyuluh Tahun 2023 sebanyak 85 orang yang menangani 135 Desa/Kelurahan, dan 1 Desa rata-rata ada 12 Kelompok Tani. Hal ini menjadi salah satu penyebab terkendalanya optimalisasi

Sumberdaya petani melalui penyuluhan dan secara kualitas perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan, sampai dengan Tahun 2023 jumlah penyuluh yang bersertifikat sebagai penyuluh ahli sebanyak 6 (Enam) orang.

7. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja, antar bidang, dan antar BPP dll dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya

Perlu koordinasi antar unit kerja, antar bidang-bidang dan antar BPP dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sangat penting agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu, namun pada kenyataan masih ada kurang dalam berkoordinasi, misalnya dalam pelaksanaan program dari pusat maupun dari provinsi yang langsung ke lapangan atau BPP, dan ada pula kegiatan bidang yang saling mendukung namun belum terorganisir secara terpadu.

8. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air

Perlu adanya peningkatan luasan lahan tanam, agar produksi pertanian dapat meningkat.

Data Luas Tanam Tahun 2020-2022

Komoditas	Luas Lahan (Ha)		
	2020	2021	2022
Padi	57.513	48.435	36.639
jagung	27.050	20.740	20.740
Kedelai	51	9	2.326
cabe	232	275,25	199,5
Bawang Merah	6	13,95	4
Karet	15.226	15.891	16.015
sawit	11.916	12.460	12.634

9. Masih terbatasnya ketersediaan pupuk

Harga Pupuk yang terus mengalami kenaikan harga menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pupuk , karena harga sulit untuk dijangkau oleh petani, sedangkan bantuan pupuk pupuk bersubsidi dari pemerintah belum dapat terpenuhi secara maksimal,

Data Bantuan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020-2022

Jumlah Penyaluran Pupuk (Ton)		
2020	2021	2022
19.495	18.710	18.610

10. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani

Perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani sangat di perlukan, agar petani tetap terlindungi pada saat mengalami kesulitan sebagai petani, diantaranya perlindungan melalui asuransi (untuk petani Padi,Jagung dan ternak sapi) atau yang dikenal sebagai AOTP. Perlindungan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan serta Jaminan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan benih unggul bersubsisi.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu–isu strategis yang berhubungan dengan pembangunan di Pertanian dapat menjadi acuan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Analisa isu- isu strategis merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, maka dapat digambarkan isu-isu yang dapat mempengaruhi pembangunan pertanian tahun 2024 – 2026 mendatang sebagai berikut.

A. Isu Strategis RPD

1. Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
3. Insfratraktur dasar dan lingkungan nhidup yang berkualitas
4. Reformasi Birokrasi
5. Penyangga Pangan IKN
6. Pembangunan Berkelanjutan(SDG'S)

B. Isu Strategis Distanhorbun

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian
3. Terkendalinya Luas Serangan OPT
4. Terpenuhiya ketersediaan Pupuk
5. Meningkatkan SDM Pertanian secara Kualitas dan Kuantitas
6. Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Petani
7. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Petani

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam kegiatan operasional Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 2024. Tujuan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, Distanhorbun menggapu urusan pilihan dalam mendukung misi, untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian selama periode 2024-2026 melalui pokok-pokok kebijakan yang di implementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Pertanian pada Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian

2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Pertanian Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel.
- b. Meningkatnya hasil pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)

Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)	2026 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		NILAI SAKIB KABUPATEN	B	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya Kinerja tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	BB	80,01	82,00	83,00	85,00
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan					
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan					
			1. Padi	143.962	144.100	144.300	144.550	144.850
			2.Jagung	122.835	122.982	123.136	123.305	123.495
			3.Cabe	2.350,90	2.360,10	2.370,10	2.380,90	2.392,80
			4.Bawang Merah	11,00	11,11	11,23	11,36	11,51
			5.Karet	14.601,70	14.887,30	15.182,30	15.486,10	15.800,20
			6.Kelapa sawit	50.865,70	51.730,42	52.920,21	54.437,37	56.109,80

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk menghadapi tantangan kedepan dalam rangka mencapai kondisi yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut harus mengembangkan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan perkembangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Strategis merupakan langkah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam manajemen dalam setiap program kegiatannya dalam merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, Strategis akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah

Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategis pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategis dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam menjalankan rencana strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5,1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	7. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahann yang baik	1. Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di SKPD	1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Melaksanakan admnistrasi keuangan perangkat daerah 3. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 4. Melaksanakan admnistrasi kepegawaian perangkat daerah 5. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah 6. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 7. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan produksi pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	1. Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian yang baik	1. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar 2. Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana teknologi pertanian 3. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan SDG /tanaman 4. Peningkatan dan penyebaran benih bermutu bersertifikat
			2. Penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian 2. Penanganan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
			3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluh dan Petani	1. Menumbuh kembangkan kooperasi pertanian. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluh 3. Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rincian Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP KABUPATEN	B	69,00		69,00		70,01		75,00		80,01		80,01		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DTPHortibun Yang Akuntabel		Nilai SAKIP DTPHortibun	BB	80,01				82		83		85		95		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Sekretariat DTPHortibun	Nilai		85			90		90		95				DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	8.000.000	7	9.984.134	2	20.000.000	3	22.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	3.440.000	4	9.939.734	5	20.000.000	5	22.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	23.920.647.200	148	26.001.065.845	136	26.001.065.845	136	28.601.172.430	136	31.461.289.672	136	31.461.289.672	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	3.440.000	5	9.995.796	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	24.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	136	152.000.000	0	-	136	167.200.000	136	167.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	10	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	10	121.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	71,4		85,7		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	6	13.205.864	1	13.179.191	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	24.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	60	143.895.207	1	93.209.655	5	500.000.000	5	550.000.000	2	605.000.000	2	605.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket	
					2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	-	1	19.210.963	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	24.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	6	49.349.506	1	44.300.580	2	50.000.000	2	55.000.000	1	60.500.000	1	60.500.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	23.462.400	2	3.600.000	1	3.600.000	1	3.960.000	1	4.356.000	1	4.356.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	200.990.000	1	668.500.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	1.080.000.000	12	1.080.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0		0	0	100		100		75		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	-	0	-	2	900.000.000	2	990.000.000	1	500.000.000	5	2.390.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-	0	-	60	180.000.000	60	198.000.000	60	217.800.000	180	595.800.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	-	0	-	5	25.000.000	11	66.000.000	0	-	16	91.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	3	6.700.000.000	3	7.370.000.000	1	1.000.000.000	7	15.070.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	66,7		66,7		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	1	1.815.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	248.435.392	4	261.292.170	3	252.500.000	3	277.750.000	3	305.525.000	3	305.525.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.212.565.463	12	1.098.778.989	12	1.246.000.000	12	1.370.600.000	12	1.507.660.000	12	1.507.660.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	60		60		100		100		100				DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25.000.000	1	25.500.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	42.350.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	107	145.000.000	107	451.500.000	22	236.200.000	22	259.820.000	22	285.802.000	22	285.802.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	19.600.000	22	15.850.000	25	25.000.000	25	27.500.000	30	35.000.000	30	35.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	242.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	0	-	0	0	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	48.400.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			kegiatan BPP 11 kecamatan x 50.000.000		jumlah pertemuan															

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket	
					2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	1	22.000.000	1	24.200.000	1	28.000.000	1	28.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	22	33.000.000	11	36.300.000	11	39.930.000	11	43.923.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	-	1	19.210.963	11	22.000.000	11	24.200.000	11	28.000.000	11	28.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0	-	2	19.200.000	2	21.780.000	2	23.958.000	2	26.353.800	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	0	-	12	387.200.000	121	425.920.000	12	468.512.000	12	515.363.200	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	-	0	-	100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRA M KEGIATA N, DAN SUB KEGIATA N	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	ket			
						2022		2023		2024		2025		2026		2026							
						Realisas i	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Unit	0	-	0	-	89	178.000.000	89	195.800. 000	89	215.380. 000	89	215.380.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	22	22.000.000	22	24.200.0 00	22	26.620.0 00	22	26.620.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				
2	Meningk atnya laju Pertumb uhan Sektor Pertania n		Laju Pertumbu han Sektor Pertanian dan Perikanan	%	%													DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				
		Meningkatny a produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultu ra dan Perkebun an	Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	ton	334.626, 30		336.070,93		337.919,84		340.170,73		326.859,11		356.892, 59		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				
			1. Padi	Jumlah produksi padi	ton	143.962		144.100		144.300		144.550		144.850		160.000		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				
			2.Jagung	Jumlah produksi jagung	ton	122.835		122.982		123.136		123.305		123.495		123.536		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				
			3.Cabe	Jumlah produksi cabe	ton	2.350,90		2.360,10		2.370,10		2.380,90		2.392,80		2.542,19		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut				

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4.Bawang Merah	Jumlah produksi bawang merah	ton	11,00		11,11		11,23		11,36		11,51		8,40		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			5.Karet	Jumlah produksi karet	ton	14.601,70		14.887,30		15.182,30		15.486,10		15,800,20		15.315,20		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			6.Kelapa sawit	Jumlah produksi kelapa sawit	ton	50.865,70		51.730,42		52.920,21		54.437,37		56.109,80		55.490,80		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase capaian pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100		50		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	900.000.000	0	0	1	1.200.000.000	1	1.320.000.000	1	1.452.000.000	1	1.452.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian	Laporan	4	250.406.981	3	444.845.087	1	750.000.000	1	825.000.000	1	907.500.000	1	907.500.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRA M KEGIATA N, DAN SUB KEGIATA N	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUA N	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kegiatan Pengelola an Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuha n, dan Mikro Organism e Kewenang an Kabupate n/Kota	Persentase capaian Pengelolaa n Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupaten/ Kota	%	0		50		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Penjamina n Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Ta naman (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur a, dan Perkebuna n)	Jumlah SDG Hewan/Tana man yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	0		1	27.860.22 1	1	76.000.0 00	1	83.600.0 00	1	100.320. 000	1	100.320.0 00	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Peningkata n Kualitas SDG Hewan/Ta naman Durian	Jumlah Pelaksanaa n Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana man	Dokum en	0		0		1	120.000. 000	1	132.000. 000	1	158.400. 000	1	158.400.0 00	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	na		na		30		45		60		60		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura	%	na		na		25		35		45		45		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan	%	na		na		5		10		15		15		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kp2B dan Lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	Dokumen	0		0		3	1.247.500.000	3	1.372.250.000	3	1.509.475.000	3	1.509.475.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Dokumen	0		1	99.733.500	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	133.100.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pesentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara	Unit	0		0		3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara	Unit	0		0		3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726000000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara	Unit	70	13.768.273.893	42	8.998.138.368	28	5.600.000.000	30	6.160.000.000	35	6.776.000.000	35	6776000000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman pertanian	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase capaian Pengendalian dan Penanggula ngan Bencana Pertanian	%	50		50		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket	
					2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	30	124.952.145	45	276.159.903	60	550.000.000	60	605.000.000	70	665.500.000	84	544.500.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang di tangani	Ha	0		0		250	350.000.000	250	385.000.000	250	423.500.000	250	423.500.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	%	100		100	100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut		
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100		100	100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut		
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	16.721.679	1	22.082.200	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	726.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh Pertanian yang terlatih	%			12,5	15,6		16,2		16,2		16,2		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut		
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	%	100		100	100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut		

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026						
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	11	77.916.301	11	326.463.989	11	400.000.000	11	440.000.000	11	484.000.000	11	484.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
			sub Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3	1.398.833.847			3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	133.100.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Hasil Nilai PMPRB	B	69,00	70,01	75,00	80,01	80,01
	Nilai SAKIP	B	80,01	82,00	83,00	85,00	85,00
2	Produksi Pertanian :						
	Padi (ton)	144.100	144.100	144.300	144.550	144.850	144.850
	Jagung (ton)	122.982	122.982	123.170	123.370	123.600	123.600
	Cabe (ton)	2.360,10	2.360,10	2.370,10	2.380,90	2.392,80	2.392,80
	Bawang Merah (ton)	11,11	11,11	11,23	11,36	11,51	11,51
	Karet (ton)	14.820,7	14.820,7	14.982,3	15.147,1	15.315,2	15.315,2
	Sawit (ton)	51.730,4	51.730,4	52.920,2	54.437,4	56.109,8	56.109,8

Indikator kinerja dan capaian kinerja merupakan harapan dan komitmen Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan produksi pertanian pada komoditas padi, jagung, bawang merah, cabe, karet dan sawit serta dapat berkontribusi melaksanakan Reformasi Birokrasi terhadap sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yakni pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi tahun 2024-2026.

Dengan adanya peningkatan produksi dari tahun ketahun tentu akan berpengaruh pada laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah, menurunnya ketimpangan pendapatan antar penduduk serta dapat terpenuhinya swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024- 2026 sangat ditentukan oleh peran serta dan kinerja seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan peran masing-masing serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pembangunan Pertanian di Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dan tidak terlepas dari peran- serta aktif masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator. Keberhasilan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Tujuan, dan Sasaran pengembangan sektor pertanian akan sangat dipengaruhi oleh keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, para petani bersama Pemerintah dan Instansi terkait, serta pihak-pihak lain yang dapat mendukung terwujudnya pertanian yang tangguh, modern dan berdaya saing di Kabupaten Tanah Laut mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024–2026 merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan. Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Tanah Laut dengan penuh tanggungjawab.

Seiring dengan keinginan untuk menempatkan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam usaha mempertahankan swasembada dan sebagai lumbung pangan di Kabupaten Tanah Laut, maka penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di sektor pertanian sangat diperlukan, sehingga pertanian yang tangguh, modern dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan di Kabupaten Tanah Laut.

TABEL T-C 23

PENCAPAIAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	satuan	Target Indikator Lainnya	Target Setiap Tahun				Realisasi Setiap Tahun				Rasio Setiap Tahun					Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Produksi Pertanian																
	- Padi (Ton)			231.660	277.959	191.267	150.000	271.941	289.359	145.890	143.962	1,17	1,04	0,76	0,96		
	- Jagung (Ton)			167.090	240.823	110.712	120.000	216.920	225.084	124.267	122.835	1,30	0,93	1,12	1,02	-	
	- Kedelai (Ton)			129.632	693	2.684	72	61	57	32	1.670	0,00	0,08	0,01	23,33		
	- Cabe (Ton)			1.545	1.594	1.645	1.698	1.843,4	2.128,1	2.135,5	2.350,9	1,19	1,34	1,30	1,38		
	- Bawang Merah (Ton)			78,7	79,7	80,7	81,8	71,4	17,3	36,6	11,0	0,91	0,22	0,45	0,13		
	- Karet (Ton)			14.000,0	13.000	13.400	13.500	14.338,2	13.391,9	14.324,3	14.601,7	1,02	1,03	1,07	1,08		
	- Kelapa sawit (Ton)			40.000,0	43.000	45.000	46.000	42.766,3	43.112,2	49.473,7	50.865,7	1,07	1,00	1,10	1,11		
2	Persentase Produksi Hasil Pertanian yang dipasarkan			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
3	Persentase Komoditas Unggulan Perkebunan yang diterima perusahaan pengolahan																
	- Kelapa Sawit			100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
	- Karet			100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
4	Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
5	Sasaran Strategis Bidang Tanaman Pangan																
	Persentase Luas Tanam Tanaman Pangan																
	-Padi			58.500	65.000	55.750	60.037	64.288	57.315	48.435	36.639	1,10	0,88	0,87	0,61		
	-Jagung			27.500	39.006	23.596	26.530	35.280	27.050	20.740	20.740	1,28	0,69	0,88	0,78		
	-Kedelai			5.500	503	2.000	51	124	51	9	2.326	0,02	0,10	0,00	45,61		
	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan																
	-Padi			56.160	62.400	53.620	58.282	55.714	62.790	32.463	28.882	0,99	1,01	0,61	0,50		
	-Jagung			26.950	38.226	21.415	25.180	36.020	29.931	19.894	20.014	1,34	0,78	0,93	0,79		
	-Kedelai			9.097	478	1.917	49	51	31	24	1.343	0,01	0,06	0,01	27,20		
	Persentase Produksi Hasil Tanam Tanaman Pangan																
	- Padi (Ton)			231.660	277.959	191.267	150.000	271.941	289.359	145.890	143.962	1,17	1,04	0,76	0,96		
	- Jagung (Ton)			167.090	240.823	110.712	120.000	216.920	225.084	124.267	122.835	1,30	0,93	1,12	1,02		
	- Kedelai (Ton)			129.632	693	2.684	72	61	57	32	1.670	0,00	0,08	0,01	23,33		
	Persentase Produk Hasil Tanam Tanaman Pangan yang di Pasarkan																
	-Padi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Jagung			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kedelai			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase Teknologi Tepat Guna yang di Terapkan																
	-Padi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Jagung			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kedelai			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	Sasaran Strategis Bidang Hortikultura																
	Persentase Luas Tanam Tanaman Hortikultura																
	-Cabe (Ha)			156	274	275	180	156	232	275,25	199,5	1,00	0,85	1,00	1,11		
	-Bawang Merah (Ha)			29	40	40	4	29	6	13,95	4	1,00	0,15	0,35	1,00		

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	satuan	Target Indikator Lainnya	Target Setiap Tahun				Realisasi Setiap Tahun				Rasio Setiap Tahun					Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	
	-Tanaman Hias			1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Semangka (Ha)			105	154,28	158,92	80	105	127	89,50	86,25	1,00	0,82	0,56	1,08		
	Persentase Luas Panen Tanaman Hortikultura																
	- Cabe (Ha)			260	232	253	250	260	497	324	256,25	1,00	2,14	1,28	1,03		
	- Bawang Merah (Ha)			25,0	6	8	2,0	25	11	11,85	2,0	1,00	1,83	1,48	1,00		
	-Tanaman Hias			1	-	-	1	1	-	1	1	1,00					
	-Semangka (Ha)			110	127	89,50	90	110	110	85,50	93,75	1,00	0,87	0,96	1,04		
	Persentase Produksi Hasil Tanaman Hortikultura yang di Pasarkan																
	- Cabe (Ton)			1.545	1.594	1.645	1.698	1.843,4	2.128,1	2.135,5	2.350,9	1,19	1,34	1,30	1,38		
	- Bawang Merah (Ton)			78,7	79,7	80,7	81,8	71,4	17,3	36,6	11,0	0,91	0,22	0,45	0,13		
	-Tanaman Hias			1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Semangka			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
7	Sasaran Strategis Bidang Perkebunan																
	Persentase Luas Tanam Tanaman Perkebunan																
	-Karet			14.500	15.000	15.500	15.900	14.996	15.226	15.891	16.015	1,03	1,02	1,03	1,01		
	-Sawit			11.000	12.000	12.000	12.500	11.916	11.916	12.460	12.634	1,08	0,99	1,04	1,01		
	-Kopi			100	130	140	140	120	130	138	144	1,20	1,00	0,99	1,03		
	Persentase Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan																
	-Karet			14.000,0	13.000	13.400	13.500	14.338,2	13.391,9	14.324,3	14.601,7	1,02	1,03	1,07	1,08		
	-Sawit			40.000,0	43.000	45.000	46.000	42.766,3	43.112,2	49.473,7	50.865,7	1,07	1,00	1,10	1,11		
	-Kopi			100	140	145	150	103	146	149	157	1,03	1,04	1,02	1,05		
	Persentase Produksi Hasil Tanaman Perkebunan yang di Pasarkan																
	-Karet			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Sawit			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kopi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan																
	-Karet			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Sawit			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kopi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
8	Sasaran Strategis Bidang PSP & Penyuluh																
	Persentase SDM penyuluh yang bersertifikat profesi			11	-	2	-	11	-	1	-	1,00		0,50			
	Persentase kelompok tani yang terampil			1.650	1.650	1.700	1.700	1.650	1.155	1.120	1.700	1,00	0,70	0,66	1,00		
	Persentase alsintan sesuai yang dapat dimanfaatkan			170	170	180	175	170	170	180	175	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase kelompok tani yang mendapat pupuk bersubsidi			16.500	16.750	15.695	15.000	16.500	16.750	15.695	15.000	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan			23	10	12	46	23	10	12	46	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentasi jalan produksi yang dapat dimanfaatkan			13	7	7	24	13	7	7	24	1,00	1,00	1,00	1,00		
9	Sasaran Strategis Eselon III Sekretaris																
	Nilai RB			B	B	BB	B	B	C	BB	BB						
	Nilai SAKIP			B	B	BB	B	B	BB	B	B						
	Persentase terkelolanya administrasi umum kepegawaian yang baik dan tepat waktu			100	100	100	100	100	97	95	95	1,00	0,97	0,95	0,95		
	Persentase terkelolanya administrasi perencanaan yang baik dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	90	90	1,00	1,00	0,90	0,90		
	Persentase terkelolanya administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan			100	100	100	100	100	100	90	90	1,00	1,00	0,90	0,90		

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA DAERAH	41.903.161.072	44.762.113.020	38.644.543.591	42.763.638.991		36.060.246.071	25.456.492.440	29.768.341.861	39.336.391.620		0,86	0,57	0,77	0,92			
Belanja Operasi	23.847.801.160	35.470.278.407	23.472.891.768	23.920.647.200		19.606.983.234	17.744.555.545	19.195.457.072	21.686.446.680		0,82	0,50	0,82	0,91			
- Belanja pegawai	23.847.801.160	35.470.278.407	23.472.891.768	23.920.647.200		19.606.983.234	17.744.555.545	19.195.457.072	21.686.446.680		0,82	0,50	0,82	0,91			
Belanja langsung/modal	18.055.359.912	9.291.834.613	15.171.651.823	18.842.991.791		16.453.262.837	7.711.936.895	10.572.884.789	17.649.944.940		0,91	0,83	0,70	0,94			
- Belanja pegawai	56.350.000	-	-	-		-	-	-	-								
- Belanja barang dan jasa	7.838.115.912	5.197.265.113	8.135.125.909	4.033.488.142		7.053.328.568	3.702.260.565	3.702.260.566	3.801.056.388		0,90	0,71	0,46	0,94			
- Belanja modal	10.160.894.000	4.094.569.500	7.036.525.914	14.809.503.649		9.399.934.269	4.009.676.330	6.870.624.223	13.848.888.552		0,93	0,98	0,98	0,94			

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)	2026 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		NILAI SAKIB KABUPATEN	B	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya Kinerja tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	BB	80,01	82,00	83,00	85,00
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan					
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan					
			1. Padi	143.962	144.100	144.300	144.550	144.850
			2.Jagung	122.835	122.982	123.136	123.305	123.495
			3.Cabe	2.350,90	2.360,10	2.370,10	2.380,90	2.392,80
			4.Bawang Merah	11,00	11,11	11,23	11,36	11,51
			5.Karet	14.601,70	14.887,30	15.182,30	15.486,10	15,800,20
			6.Kelapa sawit	50.865,70	51.730,42	52.920,21	54.437,37	56.109,80

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN			SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di SKPD	1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
						2	Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah
						3	Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
						4	Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah
						5	Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah
						6	Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
						7	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
						8	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Meningkatkan produksi pertanian	1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian yang baik	1	Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
						2	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
						3	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan SDG /tanaman
						4	Peningkatan dan penyebaran benih bermutu bersertifikat
				2	Diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian
						2	Penanganan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
				3	Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi	1	Menumbuh kembangkan koperasi pertanian.
						2	Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluh
						3	Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani

TABEL T-C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT																			
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP KABUPATEN	B	69,00		69,00		70,01		75,00		80,01		80,01		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DTPHortibun Yang Akuntabel		Nilai SAKIP DTPHortibun	BB	80,01				82		83		85		95		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Sekretariat DTPHortibun	Nilai			85		90		90		95				DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	8.000.000	7	9.984.134	2	20.000.000	3	22.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	3.440.000	4	9.939.734	5	20.000.000	5	22.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	23.920.647.200	148	26.001.065.845	136	26.001.065.845	136	28.601.172.430	136	31.461.289.672	136	31461289672	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	3.440.000	5	9.995.796	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	24200000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	136	152.000.000	0	-	136	167.200.000	136	167.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	10	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	10	121.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	71,4		85,7		100		100		100		100		DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	6	13.205.864	1	13.179.191	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	24.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	60	143.895.207	1	93.209.655	5	500.000.000	5	550.000.000	2	605.000.000	2	605.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	-	1	19.210.963	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	24.200.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	6	49.349.506	1	44.300.580	2	50.000.000	2	55.000.000	1	60.500.000	1	60.500.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	23.462.400	2	3.600.000	1	3.600.000	1	3.960.000	1	4.356.000	1	4.356.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	200.990.000	1	668.500.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	1.080.000.000	12	1.080.000.000	DTPHortibun	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)		Proyeksi	(Rp)		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0		0	0	100		100		75		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	-	0	-	2	900.000.000	2	990.000.000	1	500.000.000	5	2.390.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-	0	-	60	180.000.000	60	198.000.000	60	217.800.000	180	595.800.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	-	0	-	5	25.000.000	11	66.000.000	0	-	16	91.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-		-	3	6.700.000.000	3	7.370.000.000	1	1.000.000.000	7	15.070.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	66,7			66,7	100		100		100		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	1	1.815.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	248.435.392	4	261.292.170	3	252.500.000	3	277.750.000	3	305.525.000	3	305.525.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.212.565.463	12	1.098.778.989	12	1.246.000.000	12	1.370.600.000	12	1.507.660.000	12	1.507.660.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	60			60	100		100		100				DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25.000.000	1	25.500.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	42.350.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	107	145.000.000	107	451.500.000	22	236.200.000	22	259.820.000	22	285.802.000	22	285.802.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	19.600.000	22	15.850.000	25	25.000.000	25	27.500.000	30	35.000.000	30	35.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	242.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	0	-	0	0	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	48.400.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			kegiatan BPP 11 kecamatan x 50.000.000		jumlah pertemuan															
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0		0		100		100		100		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	1	22.000.000	1	24.200.000	1	28.000.000	1	28.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	22	33.000.000	11	36.300.000	11	39.930.000	11	43.923.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	-	1	19.210.963	11	22.000.000	11	24.200.000	11	28.000.000	11	28.000.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	0	-	0	-	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0	-	2	19.200.000	2	21.780.000	2	23.958.000	2	26.353.800	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	0	-	12	387.200.000	121	425.920.000	12	468.512.000	12	515.363.200	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	-	0	-	100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	-	0	-	89	178.000.000	89	195.800.000	89	215.380.000	89	215.380.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	22	22.000.000	22	24.200.000	22	26.620.000	22	26.620.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	%	%													DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	ton	334.626,30		336.070,93		337.919,84		340.170,73		326.859,11		356.892,59		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			1. Padi	Jumlah produksi padi	ton	143.962		144.100		144.300		144.550		144.850		160.000		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			2.Jagung	Jumlah produksi jagung	ton	122.835		122.982		123.136		123.305		123.495		123.536		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			3.Cabe	Jumlah produksi cabe	ton	2.350,90		2.360,10		2.370,10		2.380,90		2.392,80		2.542,19		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			4.Bawang Merah	Jumlah produksi bawang merah	ton	11,00		11,11		11,23		11,36		11,51		8,40		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			5.Karet	Jumlah produksi karet	ton	14.601,70		14.887,30		15.182,30		15.486,10		15,800,20		15.315,20		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			6.Kelapa sawit	Jumlah produksi kelapa sawit	ton	50.865,70		51.730,42		52.920,21		54.437,37		56.109,80		55.490,80		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian	%	100		50		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	900.000.000	0	0	1	1.200.000.000	1	1.320.000.000	1	1.452.000.000	1	1.452.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	250.406.981	3	444.845.087	1	750.000.000	1	825.000.000	1	907.500.000	1	907.500.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0		50		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA 2026		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026						
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	0		1	27.860.221	1	76.000.000	1	83.600.000	1	100.320.000	1	100.320.000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Durian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	0		0		1	120.000.000	1	132.000.000	1	158.400.000	1	158.400.000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	na		na		30		45		60		60		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura	%	na		na		25		35		45		45		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan	%	na		na		5		10		15		15		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	%	0		0		100		100		100		100		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kp2B dan Lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	0		0		1	1.247.500.000	1	1.372.250.000	1	1.509.475.000	1	1.509.475.000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	0		1	99.733.500	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	133.100.000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pesentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian	%	0		0		100		100		100		100		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Unit	0		0		3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726000000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Unit	0		0		3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726000000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Unit	70	13.768.273.893	42	8.998.138.368	28	5.600.000.000	30	6.160.000.000	35	6.776.000.000	35	6776000000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman pertanian	%	100		100		100		100		100		100		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	50		50		100		100		100		100		DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	30	124.952.145	45	276.159.903	60	550.000.000	60	605.000.000	70	665.500.000	84	544.500.000	DTPHorti un	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubhan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang di tangani	Ha	0		0	1.000	350.000.000	1.000	385.000.000	1.000	423.500.000	1.000	423.500.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	%	100		100	100		100		100		100		100	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100		100	100		100		100		100		100	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	16.721.679	1	22.082.200	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	726.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh Pertanian yang terlatih	%			12,5	15,6		16,2		16,2		16,2		16,2	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	%	100		100	100		100		100		100		100	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	11	77.916.301	11	326.463.989	11	400.000.000	11	440.000.000	11	484.000.000	11	484.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			sub Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3	1.398.833.847		3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	133.100.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut		

Tabel T-C 28

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NILAI SAKIB KABUPATEN	Dokumen/Nilai	B	69,00	70,01	75,00	80,01	
	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	Dokumen/Nilai	BB	80,01	82,00	83,00	85,00	
2	Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
	1. Padi	Ton	143.962	144.100	144.300	144.550	144.850	
	2. Jagung	Ton	122.835	122.982	123.136	123.305	123.495	
	3. Cabe	Ton	2350,90	2360,10	2370,10	2380,90	2392,80	
	4. Bawang Merah	Ton	11,00	11,11	11,23	11,36	11,51	
	5. Karet	Ton	14.601,70	14.887,30	15.182,30	15.486,10	15.800,20	
	6. Kelapa Sawit	Ton	50865,70	51730,42	52920,21	54437,37	56109,80	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari

Email : distanbun77@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

- a. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- b. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
- c. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- d. Melaksanakan penelaahan rancangan awal, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;

- e. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;
- f. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- g. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait;
- h. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 28 Desember 2022

**KEPALA DISTANHORBUN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA
DISTANHORBUN
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026**

No.	Nama / Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Distanhorbun	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Distanhorbun	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris
4.	Kabid. Tanaman Pangan	Anggota
5.	Kabid. Hortikultura	Anggota
6.	Kabid. Perkebunan	Anggota
7.	Kabid. PSP dan Penyuluhan	Anggota
8.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag. Keuangan	Anggota

**KEPALA DISTANHORBUN
KABUPATEN TANAH LAUT,**


Ir. M. FARIED WIDYATMOKO
NIP. 19680929 199503 1 006

[illegible]